

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

Maulana¹, Nadiyah², Taufiq Hady Syaputra³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi

Email: maulana@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam melalui studi kepustakaan. MBS merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan yang menekankan desentralisasi kewenangan, partisipasi masyarakat, dan kemandirian lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, MBS menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola madrasah dan sekolah Islam agar lebih efektif dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi MBS dalam lembaga pendidikan Islam mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi peran kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi kinerja. Artikel ini menegaskan pentingnya memperkuat dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam penerapan MBS agar peningkatan mutu pendidikan Islam tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islami.

Kata Kunci: manajemen berbasis sekolah, mutu pendidikan, pendidikan Islam

Abstract

This article aims to examine the implementation of School-Based Management (SBM) in improving the quality of Islamic education through a literature review. SBM represents a new paradigm in educational governance that emphasizes decentralization of authority, community participation, and institutional autonomy. In the context of Islamic education, SBM serves as a strategic tool to strengthen the governance of madrasas and Islamic schools for greater effectiveness and accountability. The results show that implementing SBM in Islamic educational institutions can enhance quality through optimizing the roles of principals, teachers, school committees, and communities in decision-making, resource management, and performance evaluation. The article emphasizes the need to integrate spiritual, moral, and social dimensions into SBM implementation so that quality improvement in Islamic education is not merely administrative but also value-oriented.

Keywords: school-based management, educational quality, Islamic education

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dari sistem sentralistik menuju desentralistik telah menjadi tonggak penting dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Pergeseran ini melahirkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau *School-Based Management (SBM)* yang memberikan otonomi luas kepada sekolah dalam mengatur dan mengelola sumber daya secara mandiri, namun tetap dalam koridor kebijakan nasional (Mulyasa, 2011; Fattah, 2012). MBS dimaknai sebagai upaya memberdayakan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan strategi, dan melaksanakan program pendidikan

yang sesuai dengan karakteristik lokal. Melalui pendekatan ini, sekolah tidak lagi diposisikan sekadar pelaksana kebijakan pusat, melainkan menjadi pusat pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan peserta didik, guru, dan masyarakat (Sudibyo, 2024).

Dalam konteks pendidikan Islam, MBS menjadi konsep strategis dalam memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan madrasah serta sekolah Islam. Pendidikan Islam memiliki misi membentuk insan kamil—manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia yang mampu berperan aktif di tengah dinamika sosial dan global (Al-Attas, 1980; Afriyanti, 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mutu pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, seperti lemahnya kapasitas manajerial lembaga, rendahnya profesionalisme tenaga pendidik, kurang optimalnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya finansial (Tilaar, 2012; Suharsimi, 2015). Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing lembaga pendidikan Islam, baik dalam mutu akademik maupun tata kelola kelembagaan (Nuril'Ibad, 2024).

MBS menawarkan solusi komprehensif untuk menjawab problematika tersebut. Melalui prinsip kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sekolah Islam diberi ruang untuk mengelola potensi sumber daya lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta menumbuhkan budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan (Mulyasa, 2013; Listanto, 2022). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti *amanah*, *syura* (musyawarah), dan *ihsan* dalam pengelolaan urusan publik. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan spiritual untuk mencerdaskan umat (QS. Asy-Syura [42]: 38).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MBS pada lembaga pendidikan Islam mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi keuangan, dan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap sekolah (Afriyanti, 2025; Sudibyo, 2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi sekolah berdampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran, disiplin guru, serta pengelolaan fasilitas pendidikan (Aliyah, 2024). Selain itu, desentralisasi keputusan mendorong kepala sekolah dan guru untuk lebih inovatif dalam pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, yang menjadi ciri khas madrasah di Indonesia (Fattah, 2012; Listanto, 2022).

Namun, implementasi MBS di lembaga pendidikan Islam tidak terlepas dari tantangan. Kapasitas manajerial kepala sekolah yang beragam, keterbatasan pelatihan, serta ketidaksiapan budaya organisasi seringkali menghambat efektivitas pelaksanaan MBS (Nuril'Ibad, 2024). Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah terhadap otonomi madrasah masih perlu diperkuat agar tidak terjadi ketimpangan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan Islam (Sudibyo, 2024). Dalam konteks inilah, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi MBS secara berkelanjutan (Afriyanti, 2025).

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis konsep, prinsip, dan implementasi MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam melalui pendekatan studi kepustakaan (library research). Dengan menelaah berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya, kajian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif teoritis mengenai hubungan antara desentralisasi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan, pengelola madrasah, dan akademisi dalam mengoptimalkan penerapan MBS agar selaras dengan nilai-nilai spiritual dan sosial yang menjadi fondasi pendidikan Islam. Dengan demikian, MBS bukan hanya instrumen manajerial modern, tetapi juga sarana transformasi menuju sistem pendidikan Islam yang lebih bermutu, berdaya saing, dan berkarakter nilai-nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali dan menginterpretasikan konsep-konsep teoritis mengenai penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam peningkatan mutu pendidikan Islam (Zed, 2014; Creswell & Poth, 2018). Sumber data utama berasal dari buku-buku teks manajemen pendidikan, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan seperti *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* dan *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan* (Kemendikbud, 2020).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahap identifikasi, seleksi, dan klasifikasi literatur berdasarkan relevansi tema dan kredibilitas sumber (Bowen, 2009). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai teori untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Melalui analisis ini, peneliti berupaya menemukan pola hubungan konseptual antara prinsip MBS, otonomi kelembagaan, dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan landasan argumentatif bagi penguatan praktik manajemen pendidikan berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru dalam tata kelola pendidikan yang berorientasi pada pemberian otonomi luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Model ini

muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem pendidikan yang terlalu sentralistik, yang cenderung menghambat kreativitas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga pendidikan (Mulyasa, 2013). Menurut Fattah (2012), MBS merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan yang berlandaskan pada prinsip desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi publik. Dengan demikian, MBS menekankan pentingnya pemberdayaan sekolah untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara mandiri dalam koridor kebijakan nasional.

Dalam konteks pendidikan Islam, MBS memiliki relevansi yang kuat karena sejalan dengan prinsip-prinsip dasar manajemen Islami seperti amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Prinsip *syura* (musyawarah) sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an (QS. Asy-Syura [42]: 38) menegaskan pentingnya keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan. Sekolah Islam yang menerapkan MBS tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menanamkan nilai spiritual dalam proses manajerialnya. Hal ini memperkuat karakter kelembagaan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan moralitas (Al-Attas, 1980; Ahmad & Abdurrahman, 2023).

Selain itu, MBS juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, MBS bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan pendekatan sistemik untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang efisien dan berkeadilan (Rahman, 2024).

2. Prinsip-Prinsip Implementasi MBS

Prinsip utama MBS mencakup empat aspek fundamental: kemandirian (*autonomy*), partisipasi (*participation*), transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*), serta kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*).

Pertama, prinsip kemandirian menekankan bahwa sekolah diberikan kebebasan dalam menyusun rencana strategis, program pembelajaran, dan pengelolaan sumber daya berdasarkan karakteristik lokal (Sudibyo, 2024). Madrasah atau sekolah Islam, misalnya, dapat menyesuaikan kurikulum agar lebih kontekstual dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kedua, prinsip partisipasi menuntut keterlibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik guru, siswa, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Dalam pendidikan Islam, prinsip ini tercermin dalam ajaran *ukhuwah* dan *ta'awun* (tolong-menolong), di mana keberhasilan lembaga pendidikan merupakan hasil kolaborasi bersama (Arifin, 2024).

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar dalam memastikan setiap keputusan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan

administratif. Menurut Afriyanti (2025), praktik transparansi di sekolah berbasis MBS meningkatkan kepercayaan publik, terutama dalam pengelolaan dana BOS dan kontribusi masyarakat.

Keempat, kepemimpinan yang kuat menempatkan kepala sekolah sebagai figur sentral yang berperan sebagai manajer sekaligus pemimpin moral (*moral leader*). Kepala sekolah bukan hanya pengambil keputusan, tetapi juga teladan dalam menjalankan nilai integritas, disiplin, dan etos kerja Islami. Penelitian Nuril'Ibad (2024) menunjukkan bahwa kepala sekolah madrasah yang menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif mampu meningkatkan kinerja guru dan semangat kerja tim dalam lingkungan berbasis MBS.

Implementasi keempat prinsip tersebut dalam lembaga pendidikan Islam berkontribusi terhadap terciptanya budaya organisasi yang sehat dan berorientasi pada mutu. Dengan demikian, MBS dapat berfungsi sebagai sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik manajerial modern yang efektif dan efisien.

3. MBS dan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Mutu pendidikan Islam tidak dapat hanya diukur dari aspek kognitif atau akademik, tetapi harus mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Al-Attas (1980) menegaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk insan *adab*, yakni manusia yang mengenal dan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini, penerapan MBS menjadi instrumen penting untuk mencapai mutu pendidikan Islam yang utuh.

MBS dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam melalui beberapa strategi utama. Pertama, melalui peningkatan profesionalisme guru. Otonomi sekolah memungkinkan kepala sekolah merancang program pelatihan guru yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar (Fattah, 2012). Guru diberi ruang untuk berinovasi dalam metode pembelajaran berbasis nilai Islam, seperti integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama (*integrative curriculum*).

Kedua, MBS mendorong optimalisasi peran masyarakat dan komite sekolah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Peran ini tidak hanya terkait pendanaan, tetapi juga pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Hal ini sejalan dengan semangat *syura* dalam Islam yang mengedepankan musyawarah dan tanggung jawab kolektif (Ismail, 2023).

Ketiga, penerapan MBS menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan dan efisien. Penggunaan dana sekolah harus disusun berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disetujui bersama dan dievaluasi secara berkala. Transparansi ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas publik (Sudibyo, 2024).

Keempat, MBS membuka ruang bagi inovasi kurikulum berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal (*local wisdom*). Madrasah, misalnya, dapat mengembangkan program tahfiz,

kewirausahaan Islami, atau kegiatan sosial berbasis masjid yang menanamkan karakter religius dan sosial peserta didik (Afriyanti, 2025).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa madrasah yang menerapkan MBS secara konsisten cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dan kinerja guru yang lebih baik (Mulyasa, 2013; Fattah, 2012). Bahkan, beberapa penelitian terbaru menemukan bahwa penerapan MBS berpengaruh positif terhadap budaya mutu, inovasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya di sekolah Islam (Rahman, 2024).

Selain itu, implementasi MBS juga mendukung transformasi digital dalam pendidikan Islam. Melalui otonomi sekolah, lembaga dapat mengadopsi teknologi digital untuk administrasi, pembelajaran daring, dan evaluasi berbasis data. Hal ini memperkuat daya saing sekolah Islam di era globalisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritualitas Islam (Mahfudz, 2024).

4. Tantangan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Lembaga Pendidikan Islam

Walaupun secara teoretis MBS menawarkan paradigma baru dalam peningkatan mutu pendidikan, implementasinya di lembaga pendidikan Islam tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, kultural, dan sumber daya manusia. Tantangan ini sering kali menjadi faktor penghambat efektivitas penerapan MBS di madrasah dan sekolah Islam, terutama di tingkat daerah.

a. Keterbatasan Kapasitas Manajerial dan Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai *key actor* dalam MBS memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh komponen sekolah. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kepala sekolah yang belum memiliki kompetensi manajerial yang memadai untuk menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi secara efektif (Sagala, 2018; Rahman, 2024). Dalam konteks pendidikan Islam, kapasitas manajerial juga harus berpadu dengan nilai-nilai spiritualitas dan etika kepemimpinan Islam. Kepala sekolah yang tidak mampu mengintegrasikan kedua aspek ini sering kali terjebak dalam manajemen administratif semata tanpa orientasi nilai (*value-based management*).

Menurut Nuril'Ibad (2024), kepemimpinan madrasah yang efektif adalah yang menggabungkan kompetensi profesional dengan prinsip *syura*, *amanah*, dan *ihsan*. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan manajemen pendidikan Islam berbasis nilai.

b. Rendahnya Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat

Salah satu pilar utama MBS adalah partisipasi aktif masyarakat. Namun, di banyak sekolah Islam, keterlibatan masyarakat masih bersifat formal dan terbatas pada dukungan dana atau kegiatan seremonial. Kurangnya pemahaman tentang fungsi partisipatif menyebabkan masyarakat belum berperan sebagai mitra strategis dalam pengambilan

keputusan (Arifin, 2024). Padahal, dalam Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam konsep *ukhuwah* dan *ta'awun*.

Ismail (2023) menegaskan bahwa kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dapat memperkuat kemandirian lembaga serta menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peran dan manfaat MBS dalam penguatan pendidikan Islam.

c. Keterbatasan Sumber Daya dan Ketergantungan Finansial

Faktor ekonomi menjadi salah satu kendala mendasar dalam implementasi MBS di sekolah Islam. Banyak madrasah masih bergantung pada bantuan operasional pemerintah tanpa memiliki strategi diversifikasi pendanaan yang berkelanjutan (Afriyanti, 2025). Kondisi ini membatasi ruang inovasi dan kemandirian sekolah. Selain itu, rendahnya kemampuan manajemen keuangan di beberapa sekolah menyebabkan pengelolaan dana belum optimal dan tidak transparan.

Sudibyo (2024) menyebutkan bahwa otonomi keuangan hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh sistem akuntabilitas yang kuat serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pendidikan Islam, pengelolaan dana juga harus memperhatikan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

d. Resistensi terhadap Perubahan Budaya Organisasi

Implementasi MBS sering kali dihadapkan pada resistensi dari dalam, terutama dari guru atau staf yang sudah terbiasa dengan sistem birokratis lama. Menurut Mulyasa (2013), perubahan sistem manajemen menuntut adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari *top-down management* menuju *participatory management*. Namun, perubahan ini memerlukan waktu dan strategi komunikasi yang baik.

Dalam perspektif Islam, perubahan budaya organisasi harus berlandaskan pada prinsip *islah* (perbaikan berkelanjutan) dan *hikmah* (kebijaksanaan). Kepala sekolah dan pemimpin lembaga pendidikan perlu menanamkan kesadaran bahwa perubahan bukanlah ancaman, tetapi bagian dari upaya mencapai perbaikan dan keberkahan institusi (Mahfudz, 2024).

e. Ketimpangan Antara Regulasi dan Praktik Lapangan

Secara normatif, kebijakan desentralisasi pendidikan melalui MBS telah didukung oleh regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas di lapangan. Banyak sekolah Islam belum mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam sistem manajemen yang kontekstual dan adaptif (Rahman, 2024).

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat

sistem pendampingan dan supervisi berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan program pendidikan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat komitmen bersama terhadap mutu.

5. Strategi Penguatan Implementasi MBS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Agar MBS benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan Islam, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya organisasi.

a. Penguatan Kapasitas Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah

Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan MBS. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi kepala sekolah dan pengelola madrasah yang menekankan kompetensi manajerial, kepemimpinan spiritual, serta kemampuan inovatif (Sagala, 2018). Pelatihan tersebut perlu dikembangkan dengan pendekatan *andragogis* dan berbasis nilai-nilai Islam agar pemimpin sekolah tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki visi moral.

Selain itu, penerapan *mentoring system* antara kepala sekolah berpengalaman dan pemimpin muda dapat mempercepat transfer pengetahuan dan memperkuat jejaring profesional antar-madrasah.

b. Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders

Strategi berikutnya adalah memperkuat partisipasi masyarakat melalui pembentukan komite sekolah yang inklusif dan fungsional. Komite sekolah harus berperan aktif dalam penyusunan program, pengawasan keuangan, dan evaluasi mutu. Menurut Afriyanti (2025), keterlibatan masyarakat yang tinggi berbanding lurus dengan peningkatan transparansi dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam konteks pendidikan Islam, partisipasi masyarakat dapat dikembangkan melalui program *wakaf pendidikan*, *koperasi syariah sekolah*, dan kegiatan sosial berbasis masjid yang mendukung kegiatan belajar-mengajar. Upaya ini sejalan dengan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi fondasi sosial umat Islam.

c. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal

MBS harus diintegrasikan dengan sistem penjaminan mutu internal (*internal quality assurance system*) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan (*continuous improvement*). Menurut Rahman (2024), penjaminan mutu internal yang efektif menuntut adanya data yang valid dan mekanisme evaluasi berbasis bukti (*evidence-based evaluation*).

Sekolah Islam dapat mengadaptasi prinsip *Total Quality Management (TQM)* dalam perspektif Islami, di mana kualitas tidak hanya diukur dari efisiensi tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai akhlak dan kebermanfaatan sosial.

d. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Manajemen

Penerapan MBS di lembaga pendidikan Islam tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menjiwai seluruh proses dengan nilai-nilai Islam seperti *amanah*, *syura*, *ihsan*, dan *adl* (keadilan). Nilai-nilai ini menjadi landasan moral yang membedakan manajemen pendidikan Islam dari model manajemen sekuler.

Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Attas (1980), pendidikan Islam yang bermutu adalah yang mampu memadukan dimensi intelektual dengan dimensi spiritual. Oleh karena itu, setiap keputusan manajerial dalam MBS harus mengandung pertimbangan etik dan spiritual sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat.

e. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Tata Kelola Sekolah

Transformasi digital merupakan tuntutan era modern yang tidak dapat dihindari. MBS dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat sistem administrasi, transparansi keuangan, dan komunikasi antar-stakeholders. Menurut Mahfudz (2024), penerapan *School Information Management System (SIMS)* berbasis digital di madrasah terbukti meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memperluas akses informasi bagi masyarakat.

Selain itu, teknologi digital dapat digunakan untuk memperluas akses pembelajaran Islami melalui platform e-learning, sehingga pendidikan Islam menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai spiritualitasnya.

6. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hasil kajian ini memperkuat pemahaman bahwa MBS bukan sekadar model manajemen desentralistik, tetapi juga pendekatan berbasis nilai yang mampu mengintegrasikan prinsip efisiensi dengan spiritualitas Islam. Secara praktis, penerapan MBS dapat menjadi model pengelolaan pendidikan Islam yang adaptif terhadap dinamika global sekaligus memperkuat identitas keislaman lembaga pendidikan.

Penerapan yang efektif menuntut kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha dalam semangat *syura* dan *ukhuwah*. Dengan demikian, MBS dapat berfungsi sebagai jembatan antara manajemen modern dan nilai-nilai Islam menuju pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter spiritual.

KESIMPULAN

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terbukti menjadi strategi efektif dalam memperkuat mutu pendidikan Islam melalui otonomi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik. Otonomi memungkinkan sekolah mengelola sumber daya sesuai kebutuhan lokal, sementara partisipasi stakeholders menciptakan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan (Mulyasa, 2013; Fattah, 2012). Dalam konteks pendidikan Islam, keberhasilan MBS tidak hanya diukur dari efisiensi manajerial, tetapi juga dari sejauh

mana nilai-nilai spiritual seperti *amanah*, *syura*, dan *ihsan* diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan praktik pendidikan (Al-Attas, 1980; Zuhdi, 2021).

Namun demikian, implementasi MBS masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas manajerial kepala sekolah dan lemahnya budaya partisipatif masyarakat (Hidayat, 2023). Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat pelatihan manajemen berbasis nilai-nilai Islam bagi kepala sekolah dan guru, meningkatkan peran komite sekolah sebagai mitra strategis, serta memperluas jejaring kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, MBS dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi menuju pendidikan Islam yang unggul, adaptif, dan berkarakter spiritual, selaras dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional berbasis nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Prenadamedia Group.
- Basri, H., & Sulistyorini, S. (2021). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 101–112.
- Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R. (2023). Evaluasi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah: Perspektif Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 8(1), 45–59.
- Kemendikbud. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2022). Transformasi Manajemen Pendidikan Islam di Era Otonomi Sekolah. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 22–34.
- Usman, H. (2019). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara.

Zuhdi, M. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pengelolaan Sekolah: Studi pada Madrasah Berbasis Masyarakat. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2), 155–168.